

6	Damang Batu	4.076	1	24,53
7	Miri Manasa	4.039	0	0
8	Rungan	10.006	1	9,99
9	Rungan Hulu	6.127	0	0
10	Rungan Barat	5.849	1	17,10
11	Manuhing	7.861	1	12,72
12	Manuhing Raya	5.709	1	17,52
Jumlah		112.484	30	26,67

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gumus, 2017

5. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Untuk menghitung rasio tenaga medis persatuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.44.
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2014 s.d 2016
Di Kabupaten Gunung Mas

NO	Uraian	2014	2015	2016
1	Jumlah Tenaga Medis	385	501	551
2	Jumlah Penduduk	138.402	109.949	112.484
3	Rasio	27,82	45,57	48,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gumus, 2017

Tabel 2.45.
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2016
Di Kabupaten Gunung Mas

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2016	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Sepang	6.865	34	0,50
2	Mihing Raya	5.622	36	0,64
3	Kurun	28.273	156	0,55
4	Tewah	19.724	29	0,15
5	Kahayan Hulu Utara	8.333	28	0,34
6	Damang Batu	4.076	48	1,18
7	Miri Manasa	4.039	29	0,72
8	Rungan	10.006	16	0,16
9	Rungan Hulu	6.127	5	0,08
10	Rungan Barat	5.849	12	0,21
11	Manuhing	7.861	8	0,10
12	Manuhing Raya	5.709	32	0,56
Jumlah		112.484	521	0,46

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gumus, 2017

KABAG HUKUM	KASUBAG
f	u

6. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

- a. Fasilitas Air bersih
- b. Pembuangan Tinja
- c. Pembuangan air limbah (air bekas)
- d. Pembuangan sampah

Hasil analisis data rumah tinggal berakses sanitasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.46.
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016
Di Kabupaten Gunung Mas

NO	Uraian	2016
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	39
2.	Jumlah rumah tinggal	35.267
3.	Persentase	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gumas, 2013

Tabel 2.47.
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Tahun 2013
Di Kabupaten Gunung Mas

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Sepang	1.666	1.666	100
2	Mihing Raya	1.461	1.461	100
3	Kurun	6.135	6.135	100
4	Tewah	5.150	5.150	100
5	Kahayan Hulu Utara	1.897	1.897	100
6	Damang Batu	1.061	1.061	100
7	Miri Manasa	937	937	100
8	Rungan	2.796	2.796	100
9	Rungan Hulu	1.863	1.863	100
10	Rungan Barat	879	879	100
11	Manuhing	1.994	1.994	100
12	Manuhing Raya	1.443	1.443	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gumas, 2013

Untuk indikator kesehatan dalam periode 3 tahun tersebut juga mengalami peningkatan sebagaimana data tabel di bawah ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
5.	A.

Tabel 2.48.
Angka Derajat Kesehatan Kab Gunung Mas Tahun 2014 - 2016

Uraian	2014	2015	2016
1. Usia harapan hidup	72	72	72
2. Angka kematian ibu	247	159	223
3. Angka kematian bayi	9	10	7
4. Kasus kurang gizi	16	3	3
5. Kasus gizi buruk	16	3	3
6. Rekam pemantauan pertumbuhan balita dengan persen:			
(%K/S)	90	99,15	99,66
(%N/D)	91	89,50	91,81
(%D/S)	74	74,5	74,66
(%BGM/D)	0,52	0,50	0,58
7. Angka kurang vitamin	25	27	30
8. Angka kasus malaria per 1000 Penduduk.	227	1.096	1.318
9. Angka kasus DBD per 1000 penduduk	36	18	5
10. Persentase keluarga yang menggunakan:			
a. MCK	25,00	27,50	30,00
b. Air bersih	45,00	46,75	48,30
c. Perumahan yang menggunakan syarat kesehatan	20,00	20,00	20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gumas, 2013

Keterangan:

- BGM = dibawah garis merah
- D = jumlah balita yang ditimbang
- K = Jumlah balita yang punya kartu menuju sehat (KMS)
- S = Jumlah balita seluruhnya
- N = Jumlah balita yang naik berat badannya.
- DBD = Demam berdarah dengue

2.3.1.3 Lingkungan Hidup

a. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Untuk menghitung persentase penduduk berakses air bersih dapat disusun pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.49.
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d 2012 Kabupaten Gunung Mas

NO	Uraian	2010	2011	2012
----	--------	------	------	------

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	h

NO	Uraian	2010	2011	2012
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	14.322	17.440	17.496
2.	Jumlah penduduk	122.967	129.115	138.903
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	11,64	13,50	12,90

2.3.1.4 Sarana dan Prasarana Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jaringan jalan di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan kondisi dapat disusun tabel sebagai berikut :

Tabel 2.50.
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2014 s.d 2016 di Kabupaten Gunung Mas

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)		
		2014	2015	2016
1.	Kondisi Baik	113,460	109,138	148,509
2.	Kondisi Sedang	104,311	90,233	66,634
3.	Kondisi Rusak Ringan	73,794	112,155	112,672
4.	Kondisi Rusak Berat	446,371	427,467	411,178
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	1.156,569	738,992	738,992

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dalam Gunung Mas Dalam Angka 2017

b. Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk

Tabel 2.51.
Rasio Tempat Ibadah Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas

NO.	Bangunan tempat Ibadah	2016		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1	2	6	7	(8=6/7)
1.	Mesjid	39	22.091	2,81
	Mushola/Langgar	23	-	-
2.	Gereja	261	71.731	3,64
3.	Pura	-	-	-
4.	Vihara	-	-	-
5.	Kelenteng	-	-	-
6.	Lainnya/ Balai Kaharingan	58	18.649	3,11
	Jumlah	381	112.484	3,39

Sumber: Kemenag dalam Gunung Mas Dalam Angka 2017

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M

c. Rasio Tempat Pembuangan sampah Per satuan Penduduk

Tabel 2.52.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2014 s.d 2016 di Kabupaten Gunung Mas

No	Uraian	2014	2015	2016
1.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	13.812	11.104	22.226
2.	Jumlah Penduduk	138.402	109.949	112.484
3.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	9,98	10,10	19,76

Sumber: BLH Kab. Gumas, 2017

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

Tabel 2.53.
Produktivitas Per Sektor Tahun 2014–2016
di Kabupaten Gunung Mas

No	Sektor	2014		2015		2016	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Total PDRB Atas dasar Harga Berlaku	3.378.383,2	100	3.776.970,5	100	4.231.787,5	100
1.1	Pertanian	1.171.641,4	34,68	1.257.783,6	33,30	1.393.689,5	32,93
1.2	Pertambangan & Penggalian	456.606,4	13,52	466.675,4	29,92	493.647,8	29,61
1.3	Industri Pengolahan	298.187,3	8,83	335.529,3	8,88	375.018,0	8,86
1.4	Listrik & Gas	508,6	0,02	735,1	0,03	836,9	0,02
1.5	Real Estate	85.989,4	2,55	103.392,2	2,74	118.847,1	2,81
1.6	Perdag, Besar & Eceran	286.788,6	8,49	334.882,5	8,87	389.323,2	9,20
1.7	Informasi & Komunikasi	42.555,6	1,26	45.556,4	1,21	48.964,1	1,16
1.8	Jasa Perusahaan	1.641	0,05	1.887,8	0,05	2.114,7	0,05
1.9	Jasa Lainnya	9.994,3	0,30	11.697,4	0,30	13.018,4	0,30
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	-	77,44	-	-	-

Sumber: BPS Kab. Gumas dalam Gunung Mas Dalam Angka 2017

Ket : * Angka Sementara, ** Angka sangat sementara



2.4.2.Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

2.4.2.1 Aksesibilitas Daerah

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.54.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2014 s.d 2016 di Kabupaten Gunung Mas

No	Uraian	2014	2015	2016
1.	Panjang Jalan	737,935	737,935	737,935
2.	Jumlah Kendaraan	3.012	3.231	9.984
3.	Rasio	0,24	0,23	0,07

Sumber: Dishubkominfo Kab. Gunung Mas, 2017

b. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.55.
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun 2010 s.d 2012 di Kabupaten Gunung Mas

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012
1.	Jumlah orang	Orang	10.368	96.725	106.327
2.	Jumlah Barang	Ton	-	-	-

Sumber: Dishubkominfo Kab. Gunung Mas, 2013

c. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam periode 1 (satu) tahun. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

KASABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	- H

Tabel 2.56.
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal
Tahun 2014 s.d 2016 di Kabupaten Gunung Mas

No	Uraian	2014		2015		2016	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang
1.	Dermaga	-	-	-	-	-	-
2.	Bandara	439	-	276	-	22	-
3.	Terminal	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	439	-	276	-	22	-

Sumber: Dishubkominfo Kab. Gunung Mas, 2017

2.4.2.2 Penataan Wilayah

a. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.57.
Rasio Luas Wilayah Produktif (Ha) Tahun 2016
Di Kabupaten Gunung Mas

NO	Uraian	2016
1.	Luas Wilayah produktif	682.193,41
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	725.599,42
3.	Rasio (1./2.) (%)	94,02 %

Sumber: Rancangan Perda RTRW Kab. Gumas, 2012-2032

b. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.58.
Rasio Luas Wliayah Industri (Ha) Tahun 2012
Di Kabupa ten Gunung Mas

No	Uraian	2012
1.	Luas Wilayah Industri	510
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	725.599,42
3.	Rasio (1./2.)(%)	0,07%

Sumber: Rancangan Perda RTRW Kab. Gumas, 2012-2032

c. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M.

Tabel 2.59.
Rasio Luas Wilayah Perkotaan (Ha) Tahun 2012
Di Kabupaten Gunung Mas

No	Uraian	2012
1.	Luas Wilayah Perkotaan	42.896,01
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	725.599,42
3.	Rasio (1./2.) (%)	5,91 %

Sumber: Perda RTRW Kab. Gumas, 2012 – 2032

2.4.2.3 Fasilitas Bank dan Non Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. Jenis dan Jumlah Bank yang ada di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.60.
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Tahun 2014-2016
di Kabupaten Gunung Mas

No.	Sektor	Jumlah		
		2014	2015	2016
1.	Bank Umum			
1.1.	Konvensional	4	4	4
1.2.	Syariah	0	0	0
2.	Non Bank			
2.1.	Konvensional	1	1	1
2.2.	Syariah	0	0	0
	Jumlah	5	5	5

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	W

2.4.2.4 Fasiitas Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik tahun 2010-2012 di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61.
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Tahun 2014–2016 di Kabupaten Gunung Mas

No	Uraian	2014	2015	2016
1.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	7.927	8.431	8.980
2.	Jumlah Rumah Tangga	23.504	23.659	35.267
3.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (2)/(3)	33,73	35,64	25,46

Sumber: Distamben Kab. Gunung Mas, 2017

2.4.2.5 Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Penginapan adalah perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan untuk umum, termasuk dalam pengertian rumah penginapan adalah hotel, gubuk pariwisata (cottage), motel (motorist hotel), losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), pondok pariwisata (home stay), penginapan remaja (young hostel).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>h.</i>

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi:

- a. Hotel Berbintang
- b. Hotel Melati

Berdasarkan Gunung Mas Dalam Angka 2017 di Kabupaten Gunung Mas belum memiliki hotel berbintang. Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel tahun 2014 s/d 2016 di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.62.
Banyaknya Akomodasi Penginapan/Hotel
Tahun 2014 - 2016 di Kabupaten Gunung Mas

No.	Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	2014	18	332	493
2.	2015	19	338	468
3.	2016	18	325	447

Sumber: BPS Kab. Gunung Mas dalam Gunung Mas Dalam Angka 2017

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban

a. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.63.
Angka Kriminalitas di Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2014-2016

No.	Jenis Kriminal	2010	2011	2012
1.	Jumlah kasus Narkoba	2	9	5
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	1	2	4
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	5	6	4

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	N

No.	Jenis Kriminal	2010	2011	2012
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	13	15	14
5.	Jumlah kasus Pencurian	17	27	27
6.	Jumlah kasus Penipuan	2	2	1
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	1	-	1
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	41	61	56
9.	Jumlah Penduduk	115.409	116.114	138.903
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	3,55	5,25	4,03

Sumber: Polres Gunung Mas, 2013

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Luiusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin

KABAG MUKUM	KASUBBAG
b.	h.

baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.64.
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Gunung Mas

NO	Uraian	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	243	18	-
2.	Jumlah lulusan S2	-	-	-
3.	Jumlah lulusan S3	-	-	-
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	243	18	-
5.	Jumlah penduduk	115.409	116.114	-
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	0,21	0,02	-

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Gummas, 2017

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependencyratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependencyratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin

KABAG MUKUM	KASUBBAG
f.	M.

rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.65.
Rasio Ketergantungan Tahun 2014 s.d 2016
di Kabupaten Gunung Mas

No	Uraian	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	42.342	34.912	35.266
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	4.189	3.688	3.864
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	46.531	38.600	39.130
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	83.775	71.347	73.354
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,56	0,54	0,53

Sumber : Hasil analisis, data diolah dari berbagai sumber, 2017

KABAG HUKUM	KASUBAG
f.	u

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2019

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
Pertumbuhan PDRB (%)	6,9	7	7,15	7,2	6,41	6,96	7,00	
Laju inflasi (%)	7,8	6,9	6,4	5,1				
Kenaikan PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku (%)	19,26	26,78	27,98	29,12	6,41	6,96	7,00	
Angka kemiskinan (%)	6,45	6,2	5,93	5,67	6,70	6,17	5,85	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,00%	7,20%	5,00%	4,00%	1,20%	2,70%		
Indeks Pembangunan Manusia (%)	74,42	74,89	74,99	75,03	68,13	69,24	69,73	
Jumlah Pendapatan Per kapita/Tahun				5.238.760	9.965	10.044	10.155	
Jumlah PDRB Per kapita/Tahun				1 buku Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas	3378.383,3	3.776.970,5	4.231.787,5	
Angka Pengangguran				58	68,13	69,24	69,73	
Fokus Layanan Urusan Wajib								
Pendidikan								
Angka melek huruf (%)	99,79	99,89	99,99	99,99	99,73	99,53	99,95	
Angka Partisipasi Kasar								
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	43	50	57	60				
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	115	115	100	100	120,68	120,19	116,41	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	90	90	90	90	90,8	89,17	100,99	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (%)	55	65	70		49,33	67,29	61,15	
Angka Pendidikan yang di matikan								
Angka Partisipasi Murni								
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,65	99,75	99,75	99,75	99,34	10,13	95,84	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	75	80	85	90	63,35	66,64	65,64	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C (%)	40	60	75		47,26	47,69	36,49	
Fokus Layanan Urusan Wajib								
Pendidikan								
Pendidikan dasar								
SD/MI								
Perbandingan Siswawan Guru SD/MTs	111,6	102,0	91,2	81,6	1:1,13	1:1,10	1:1,11	
Angka Partisipasi Sekolah (%)	100	100	100	100	99,63	110,59	110,41	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	01,22	01,22	01,22	01,22		14,09	00,00	
SMP/MTs								
Perbandingan siswawan dan guru SMP/MTs	9,27	8,67	7,67	7,67	1:1,15	1:1,10	1:1,12	
Angka Partisipasi Sekolah (%)	98	96	98	98		96,44	97,41	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	01,27	01,27	01,27	01,27		02,52	00,00	
Pendidikan Menengah								
Rasio siswawan dan guru	12,25	12,12	12		1:1,11	1:1,13	1:1,16	
Angka Partisipasi Sekolah (%)	81	83	83			55,07	41,44	
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	01,36	01,36	01,36			03,21	00,00	
Facilitas Pendidikan								
Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	45,00	50,00	60,00	70,00		22,87	23,61	
Persentase SMP/MTs yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	35,00	45,00	50,00	60,00		15,06	17,58	
Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	98,00	99,00	100,00			24,32	30,4	
Angka Harapan Lama Sekolah								
Angka Harapan Lama Sekolah				12,7th	10,82	11,44	11,74	
Rata-rata Lama Sekolah				9,7th	8,74	8,93	8,94	
Angka Putus Sekolah								
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	21,00%	69,00%	89,00%	
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,30%	0,30%	0,30%			337,00%	47,00%	
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV								
Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35,00	40,00	50,00	60,00		66,42	77,23	
Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,00	85,00	87,00	90,00		76,08	82,98	
Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,00	90,00	92,00			76,82	98,62	
Angka Kelulusan								
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100		97,32	97,69	
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100		96,63	97,79	
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	100			99,54	97,95	
Angka Melejitaskan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100		931,6	95,63	
Angka Melejitaskan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99	99	99			8569	84,35	
Kesehatan								
Angka Kelangkaan Hidup Bayi								
Angka Kelangkaan Hidup Bayi	90	91	92	93	90	86,86	92	93,79
Angka Usia Harapan Hidup	70,1	70,1	71	71	72	72	72	72
Angka Gila Buruk (%)	8	7	6	8	4	3	3	3
Angka ke matian ibu	116	106	102	241/100.000 KLH	247	159	223	103/100.000 KLH
Angka Kematian Bayi	15	15	11	8/1.000 KLH	0	30	7	8/100 KLH
Angka Kesakitan				43980				
Rasio Posyandu per satuan balita	140 : 11.590	140 : satuan balita tahun 2015	145 : satuan balita tahun 2016	145 : satuan balita tahun 2017	141 : 9.340	141 : 9.388	142 : 10.619	140 : 9.975
Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	85 : 130.305	87 : penduduk Tahun 2015	89 : penduduk Tahun 2016	90 : penduduk Tahun 2017	96 : 154.084	96 : 107.500	96 : 109.949	89 : 112.484
Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk	1 : 130.305	1 : penduduk Tahun 2015	1 : penduduk Tahun 2016	1 : penduduk Tahun 2017	1 : 154.084	1 : 107.500	30 : 109.949	35 : 112.484
Rasio Dokter per satuan penduduk	26 : 130.305	27 : penduduk Tahun 2015	28 : penduduk Tahun 2016	29 : penduduk Tahun 2017	25 : 154.084	28 : 107.500	30 : 109.949	35 : 112.484
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	492 : 130.305	497 : penduduk Tahun 2015	507 : penduduk Tahun 2016	517 : penduduk Tahun 2017	435 : 154.084	508 : 107.500	664 : 109.949	592 : 112.484
Catupan Puskesmas	1,41	1,41	1,45	1,45	100	100	100	100
Catupan Pembantu Puskesmas	0,67	0,69	0,70	0,71	100	100	100	0,69
Catupan kunjungan ambulasi	95	95	96	96	91,09	89,11	80,57	90

KABAG HUKUM	KASUBBAG

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	60	65	65	66	45,82	36,94	33,16	60,95
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	92	93	94	95	87,87	86,86	86,86	86,73
Cakupan ibu Nifas	92	95	95	96	87,87	87,56	88,8	90,03
Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	80	82	82	39,88	31,02	16,88	52,23
Cakupan Kunjungan Bayi	92	95	95	96		91,3	92	
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	127	127	127	127		97	127	81,3
Cakupan pelayanan anak balita	92	95	95	96				80,26
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-23 bulan keluarga miskin	95	95	95	100				
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan tingkat	90	92	92	94	86,33	78,85	83,59	99,4
Cakupan peserta KB aktif (Dinas Kesehatan/RSUD)	60	62	62	64	106,49	54,28	49,5	101,95
Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	2/100	2/100	2/100	2/100	0	0	0	0
Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	100	100	100				0,21
Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	100	100	100	100				
Penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	0	0	1,82	140,46
Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100		3,216	1,564	115,2
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	30	35	40	45				
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,1	0,1	0,1	0,1				
Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100				0
Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	3 Spesialis & 2 Residence	5 Dokter spesialis	7 Dokter spesialis	8 Dokter spesialis	3 Spesialis & 2 Residence	5 Dokter spesialis + 1 Dokter Residence	5 Dokter spesialis + 3 Dokter Residence	8 Dokter spesialis
Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	50%	65%	75%	80%	50%	65%	61%	61%
Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	60%	65%	75%	80%	60%	65%	138%	98%
Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D
Cakupan Desa Siaga Aktif	72	71	76	78				
Penataan Ruang								
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	122.921,34	272.778,69	272.778,69	272.778,69	0,122	0,146	0,176	0,365
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	87,00	78,00	60,50	60,50	87	21,5	300	20
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	4000	8500	113,00	127,00	7,412	7,114	7,486	7,450
Pekerjaan Umum								
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	15,294%	18,008%	20,940%	23,537%	15,375%	14,768%	20,096%	24,510%
Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	45%	48%	54%	59%	45,50%	48%	56,60%	78%
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	28%	34%	40%	45%	29%	39%	36%	39%
Rasio Tempa Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	4,31%	5,80%	7,51%	9%	9,48%	10,10%	19,76%	10,63%
Persentase penanganan sampah (%)	31%	38%	46%	50%	5,04%	4,51%	12,21%	12,21%
Rasio Rumah Layak Huni	15,300%	17,100%	21,100%	23,425%	18,037%	17,345%	25,855%	23,328%
Pemukiman Layak Huni (Ha)	917,00	926,00	938,00	947,00	4,906	6,856	6,856	6,909
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935
Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik				23,54%				24,510%
Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik				5%				4,4%
Jumlah Desa yang Terhubung Dengan Kecamatan				3 Desa				3 Desa
%Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih				3 Desa				3 Desa
% Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik				15%				12,42%
Perumahan								
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Juta)	11,404	12,190	12,940	13,690	3,149	3,397	3,721	14,844
Rumah Tangga Bersanitasi (%)	28%	34%	40%	45%	29%	39%	36%	39%
Rumah Layak Huni (unit)	18.440	18.620	18.810	18.910	23.508	23.659	35.267	26.241
%Desa yang Memiliki Perumahan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni				23,43%				23,328%
Penataan Ruang								
Rasio Bangunan bertingkat bersatu bangunan	0,72%	5,75%	10,80%	16,10%	0,28%	0,46%	0,59%	0,81%
Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	17,15%	19,35%	20,44%	26,15%	0,81%	0,98%	0,98%	0,98%
% Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik				15%				15%
Perencanaan Pembangunan								
Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	Ada	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Perubahan Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Persentase kesesuaian antarmuatan antara SKPD dengan RPJMD	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD	90%	90%	100%	100%				
Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab (RTRWK) dan turunannya	90%	90%	100%	100%				
Jumlah Dokumen Perencanaan				100%				
Perhubungan								
Jumlah Bandara (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dermaga Sungai (buah)	2	1	1	-	2	1	-	-
Jumlah penumpang/ barang melalui bandara								
- Jumlah penumpang (orang)	157	360	360	360	465	278	-	83
- Jumlah barang (kg)	221	360	360	360	821	908	-	469
Persentase Penurunan Angka/jumlah Kecelakaan lalu lintas				10				33
Lingkungan Hidup								
Jumlah duta lingkungan (orang)	-	2 Orang	10 Orang	12 Orang		2 orang	2 orang	
Jumlah had/wiyata (sekolah)	2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	
Pencemaran status mutakhir	-	-	33,3%	66,7%	44%	52%	52%	39%
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	40,1%	51,9%	61,0%	88,9%	37%	48%	56%	79%
Perakatan Hukum Lingkungan	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah				30%				73,3%

KABAG HUKUM KA SUBBAG


FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
95 standar Batu Mutu Udara				30%				73,3%
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
Ke pemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	45	50	55	60				
Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia				
Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	46	50	60	65				
Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	35	40	46	50				
Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)	55	60	65	70				
Pemberdayaan Perempuan dan Perbuduhan Anak								
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	11,26	11,48	11,70	11,93				
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	16,804	17,052	17,300	17,458				
Rasio KDRT	0,5%	0,5%	0,5%	1%	2 kasus	1 kasus	2 kasus	
Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)	0	1%	1%	2%				
Indeks Pemberdayaan Gender (IGDI)				77,92				
Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani Sesuai Dengan Standar				100				
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terlayani Sesuai Dengan Standar				100				
Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana								
Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga (%)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,8	2,8	2,729	
Rasio Akseptor KB (orang)	1500	1500	1500	1500	1600	1500	1500	
Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)	16.727	14.400	20.240	22.264	19.151	15.625	14.594	
Jumlah PLK Aktif (orang)	9	9	20	30	9	12	13	
Terpadunya program Kerja KB (program)	2	2	2	2	2	2	2	
tersedianya lokasi KB di Klinik (buah)	54	54	60	65	54	54	60	
Jumlah sarana dan prasarana KB (unit)	3	4	6	8	3	4	6	
Keluarga Pra Sejahtera I	18	18	18	18	-	-	16,5	
Tingkat ketahanan Ekonomik keluarga (kelompok)	26	35	45	55	-	-	135	
Jumlah kelompok tribrata (kelompok)	33	38	46	55	-	-	36	
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	2079	2379	2679	2979	2079	2143	-	
Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta (orang)	1025	1225	1425	1703	724	-	-	
Jumlah KDRT (orang)	2	2	2	2	2	1	2	
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (kasus)	2	2	5	5	-	-	-	
Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2T2A (kasus)	11	7	7	7	-	3	9	
Jumlah balita ikut posyandu (anak)	9605	9715	9806	9923	-	-	-	
Jumlah PK-R di SMP/SMA/organisasi kepemudaan	18	18	25	30	-	18	68	
Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	0	0	1	1	-	-	-	
Jumlah kebijakan Sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan (kelompok)	0	0	2	3	-	-	-	
Sosial								
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	-	-	-	1				
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%				
Penanganan penyandang masalah kejahteraan sosial (Orang)	86%	86%	86%	86%				
Ketenagakerjaan								
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	76,9%	76,9%	76,9%	76,9%		77,44%		
Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,00%	7,00%	5,00%	4,00%	12,0%	2,70%		
Ketenagakerjaan								
Jumlah lulusan S1/S2/S3	1.363	1.363	1.363	1.363	1.378	1.380	1.372	1.393
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,70%	98,13%	98,7%	98,92%
Jumlah Tenaga Kerja S2, S3				0				
Koperasi dan UKM								
Koperasi Aktif (%)	77,92	78,6	79,91	81,22	40%	45%	50%	52%
Jumlah UMKM	2.943	2.951	2.967	2.982	2,9	2.922	2,93	2,913
Jur nah industri	219	224	229	234				
Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	4	5	8	10				4
% Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat	4%	7%	9%	12%	20%	20%	25%	27%
% UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat				61,16%				40,90%
Penanaman Modal								
Jumlah Investor PMDN dan PMA	116	118	120	132	110	138	120	42
Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Ditelesaikan Tepat Waktu	79%	79%	79%	80%	75%	79%	79%	80%
Lamanya hari proses perizinan	10	10	10	10	10	10	10	10
Indeks Kepuasan Masyarakat	72	75	77	79	72	72	70,25	79,06
Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
N/BI Investasi Daerah								
Kebudayaan								
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya lokal	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	-	1	1	1	0	0	1	
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	1	1	1	1	1	9	12	
Kesenian								
Jumlah Grup Kesenian (Buah)	1	1	1	1	26	26	26	
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1	1	1	1	0	0	1	
Kepemudaan Olahraga								
Jumlah Klub Olahraga (buah)	1	1	1	1	0	0	0	
Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	1	1	1	1	0	0	0	
Jumlah Organisasi Pemuda	1	1	1	1				
Jumlah Organisasi Olahraga	1	1	1	1				
Jumlah Gelanggang/balai remaja (gelang milik swasta)	1	1	1	1				
Jumlah Lapangan Olahraga	1	1	1	1				
Jumlah Pemuda Berprestasi				7%				
Jumlah Mendaki				15 Buah				

KABAG MUKUM KASUBBAG

(Handwritten signatures and initials)

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017
Parwisata								
Kunjungan Wisata	5.000	4.300	4.500	4.700	1.100	1.250	3.500	9457
Jumlah objek wisata daerah	3	1	3	1				1
PDRB Sektor Pariwisata				70%				70%
Kesetaraan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	100%	100%	100%	100%	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	
Kegiatan Pembinaan politik daerah	100%	100%	100%	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
Administrasi Pemerintahan								
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	46	55	62	69				
Jumlah UH/MAS per jumlah 10.000 penduduk (orang)	564	578	580	590				
Rasio Polisi Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan	132	137	142	147				
Peningkatan PERDA	2	10	11	14				
Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian secara Online (%)	10	30	30	40				
Nilai Reformasi Birokrasi				65				
Nilai Sakip				B				
Opini BPK				WTP				
Level Keselamatan				Level 2				Level 2
Level Mutu				Level 2				Level 2
IKM				10				
Anaka Kriminal				20				
Jumlah Konflik yang Diselesaikan				30				
Tingkat Pelanggaran Terhadap Perda				40				
Pembudayaan Masyarakat dan Desa								
Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	45 desa/kel	87 desa/kel	127 desa/kel	127 desa/kel	43	0	0	114
Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat Terlaksananya Badan Bakti Gotong Royong Masyarakat	0 desa/kel	24 desa/kel	48 desa/kel	72 desa/kel	0	38	48	72
Jumlah Kader Pembudayaan Masyarakat Desa yang terlatih	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1	1	1	1
Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	191 orang	247 orang	305 orang	383 orang	31	247	325	379
		0	0	1 desa/kel	1	4	8	4
Kearsipan								
Pengelolaan arsip secara baku :								
a. Umum	85	115	120	115				
b. Pemerintahan	75	90	100	115				
c. Politik	35	50	70	71				
d. Keamanan dan ketertiban	40	60	80	85				
e. Kesejahteraan rakyat	60	60	70	85				
f. Per ekonomian	60	70	85	90				
g. Pekerjaan umum	70	80	90	100				
h. Pengawasan	40	60	90	90				
i. Kepegawaian	80	100	115	100				
j. Keuangan	90	130	130	140				
Statistik								
Buku "Gunung Mas dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada				1 Buku
Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	Ada	Ada	Ada	Ada				18 Buku
Komunikasi dan Informatika								
Website milik pemerintah daerah (buah)	13	18	23	28	13	18	23	33
Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	42	44	50	56	42	44	47	54
Jumlah Radio/TV lokal	1	1	1	1	1	1	1	1
Rasio Wartel/Wameterhadap Penduduk	0,099	0,090	0,025	0,022	0,099	0,090	0,025	0,000
Jumlah Kantor Pos (Unit)	6	6	6	6	6	6	6	6
Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	3	3	5	7	3	3	5	2
Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	6	6	8	7	6	6	6	9
Jumlah Mobil Internet Kecamatan (lv-PLUK)	7	7	7	7	7	7	7	7
Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	14	14	14	14	14	14	14	14
Jumlah akses broadband (Hotspot WiFi)	2	2	3	3	2	2	3	2
Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	624	624	624	624	524	624	624	626
Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAP1	0	0	2	2	0	0	0	0
Jumlah kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	13	18	24	24	13	18	24	24
Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	0	0	2	3	0	0	2	2
Jumlah Badan Publik PPIID	4	7	10	12	4	7	10	26
Pameran / expo	1	1	1	2	1	1	1	1
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	80,12	79,80	79,78	79,68	80,12	79,80	79,78	85,8
Buletin/Melajah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal	0	0	1	0	0	0	1	16
Media Luar Ruang (Papan Informasi, Balok, Spanduk, Videotron) / Yagiatan	15	15	15	15	15	15	15	17
% Desa yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi				5 Buku (47 Menara)				49,16%
Perpustakaan								
Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1	1	1	1
a. Jumlah Perpustakaan umum	40	41	42	43	40	40	40	40
b. Jumlah perpustakaan sekolah :								
- SD/MI	166	168	170	172	166	166	166	166
- SMP/MTs	16	16	16	12	16	16	16	16
- SMA/MA	13	15	17	13	13	13	13	13
c. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	46	49	52	60	21	49	49	50
d. Jumlah perpustakaan rumah ibadah	0	0	0	2	0	0	0	0
e. Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	0	0	0	1	0	0	0	0
Jumlah anggota	975	1113	1250	1350	825	1064	1208	1478
Jumlah pengunjung	2881	3250	3250	3700	1.669	2.850	3.040	4.028
Jumlah koleksi bahan perpustakaan	25.325	29780	35765	42320	19.423	21.815	24015	30.130
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
Pertanian dan Ketahanan Pangan								
Pertanian								
% PDRB Sektor Pertanian				> 7%	698	6,46	7,58	
Luas Tanam Tanaman Pangan								
Padi sawah (Ha)	800	835	1000	1.100	N/A	N/A	N/A	
Padi ladang (Ha)	3.622	3.069	3.860	3.924	N/A	N/A	N/A	
Jagung (Ha)	169	171	173	28	N/A	N/A	N/A	

KABAG HUKUM KASUBAG

B. M.

FOKUS/BIDANG URUSAN /INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Luas Panen Tanaman Pangan								
Padisawah (Ha)	750	815	920	1.090	613	542	999	
Padiladang (Ha)	3.608	2.859	3.737	3.807	2.919	4.262	2.228	
Jagung (Ha)	134	14	25	26	11	120	59	
Produktivitas Tanaman Pangan								
Padisawah (Kwintal/Ha)	33,5	33,83	34	45,66	33,77	35,39	22,71	
Padiladang (Kwintal/Ha)	21,86	23,84	22,48	24	21,46	22,01	19,73	
Jagung (Ton/Ha)	19,54	28,5	24,68	25,66	27,27	27,08	25,42	
Produksi Tanaman Pangan								
Padisawah (Ton)	2.550	2.757	3.128	4.976	2.070	1.918	2.133	
Padiladang (Ton)	6.192	6.807	12.353	11.790	6.264	9.380	4.395	
Jagung (Ton)	57	62	64	66	30	325	150	
Populasi Ternak								
Kerbau (ekor)	120	130	150	165	131	141	152	
Sapi (ekor)	3.609	3.860	4.060	4.310	3.365	4.034	4.160	
Babi (ekor)	22.340	24.380	26.210	27.250	25.054	28.580	30.876	
Ayam buras (ekor)	66.560	68.450	69.750	70.820	69.540	76.830	78.751	
Ayam ras pedaging (ekor)	60.216	65.750	70.120	72.540	62.920	89.560	88.640	
Produksi Ternak								
Kerbau (Ton)	1,8	2,2	2,4	2,6	2	4,55	5,749	
Sapi (Ton)	82	84	87	90	83,4	84,5	88,793	
Babi (Ton)	208	212	214	216	215	220,52	226,129	
Ayam buras (Ton)	66,5	67,8	68,5	69,9	67,4	72,008	70,13	
Ayam ras pedaging (Ton)	380,2	390,4	395,2	397,5	189,49	390,29	395,814	
Produksi Telur								
Ayam buras (Ton)	245	262	275	28,7	26,56	27,07	41,039	
Pengembangan/pelebaran area perkebunan								
Karet (Ha)	175	125	100	75	68.100	68.281	118.772	
Kelapa Sawit (Ha)	280	200	280	300	977	1.396	3.390	
Produksi Komoditi Perkebunan								
Karet (Ton)	48.562	48.567	48.574	48.588	45.351	17.570	20405	
Kelapa Sawit (Tbs) (Ton)	-	11.000	5.880	4.400	60	-	-	
Produktivitas Komoditi Perkebunan								
Karet (kg/ha)	1.380	1.200	1.250	1.250	6,66	2,57	1,72	
Kelapa Sawit	-	435	460	500	0,61	-	-	
Ketahanan Pangan								
Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup/KepBup)	1	2	1	1	1	1	1	
Ketersediaan Pangan Utama (%)	5,8	6,3	6,9	33,6	34,2	42,9	31,94	
Transmigrasi								
Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	82,4	84,8	91,2	95,6	76,41	81,56	86,71	93,22
Kehutanan								
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	26.477	24.570	20.000	18.270				
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	37.514.161.455	40.045.658.000	40.065.650.000	40.065.650.000				
Pertanian kawasan KPH PI (peruntukan kawasan KPH PI) (Km)	0	75 Km	75 Km	75 Km				
Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Haju (Ha)	1.000	1.000	1.000	1.000				
Pembangunan KPH PI (unit)	1	0	2	0				
Pembangunan TAHURA	0	1	0	0				
Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	0	5	0	0				
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HT R) (unit)	0	6	1	1				
Jumlah Penjualan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Pertahun				20				9
Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Pemerintah Bagi Masyarakat Miskin Tepat Waktu				10				0
% Pembebasan Tanah yang Disediakan Tepat Waktu				30				57,34%
Luas Kawasan Tahura yang Terlewat dan Terjaga Ketersediaannya				4119 Ha				12 Ha
Energi dan Sumber Daya Mineral								
Luas wilayah yang dilevelkan (Ha)	48526 Ha	42.948 Ha	42.948 Ha	42.948 Ha				
Kontribusi sektor pertambangan dari PNPB dan PAD (Rp)	2.200.000.000 dan 2.091.000.000	12.998.184.000 dan 1.551.000.000	12.998.184.000 dan 1.551.000.000	12.998.184.000 dan 1.551.000.000				
Rasio ketersediaan daya listrik	4.870 MW	4.896 MW	4.922 MW	4.948 MW				
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	5636%	6508%	72.35%	79.62%				
Jumlah Desa berlistrik	74 Desa	83 Desa	92 Desa	101 Desa				
Kelautan dan Perikanan								
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	1.430,00	1.975,00	3.358,00	5.036,00	1.430,00	1.978,00	3.363,06	3.701,82
Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	216,24	218,40	222,77	227,23	200,2	535,1	351,4	260,60
Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	33	34	36	38	27	36	37	39
Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	140	200	240	270	89,2	118	240	207,89
Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	23,7	25	26,25	27,56	7,7	6,27	109,97	27,81
% PDRB Sub Sektor Perikanan				6,5				
Perdagangan								
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	12,3	13,25	13,26	13,26	9,10	9,10	8,81	9,41
Perindustrian								
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	2,07%	2,33%	2,43%	2,53%	9,49%	9,50%	8,97%	8,86%
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri (%)	40,63%	41,40%	42,17%	42,94%				
Pertumbuhan Industri (jumlah)	50	50	50	50	1	4	46	35
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	268	338	368	421	219	223	269	304
Penanggulangan Bencana								
Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	1	5	9	8				

KABAG HUKUM KASUBBAG
b. H

FOKUS/BUDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam)	5	6	4	3				
Meningkatnya tingkat pemulihan pascabencana nonmanusia (%)	100	100	100	100				

KABAG HUKUM	KASUBBAG
8.	u

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Sumber Pendapatan Daerah

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	W

mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, digunakan sebagai dasar dalam rencana RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019. Dalam perencanaan APBD ditetapkan target pendapatan daerah yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki serta tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah yang merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan pendapatan.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010-2013 Kabupaten Gunung Mas

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN		458.383.292.053,14	533.076.340.963,52	570.979.558.288,28	667.568.412.988,51	0,84
1.1.	Pendapatan Asli Daerah		13.718150.722,14	15.793.358.675,52	22.189.739.348,92	24.653.836.617,10	12,30
1.1.1.	Pajak daerah		2.132.629.462	2.231.699.861	2.794.211.417,10	6.894.921.297,6	29,13
1.1.2.	Retribusi daerah		3.515.390.560	3.895.404.495	4.544.759.194	7.269.485.704,10	21,03
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan		1.520.285.948,71	2.522.896.531,30	3.060.277.107,31	3.716.436.535,38	34,97
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah		6.549.844.751,43	7.143.357.788,22	11.790.491.630,51	6.772.993.080,02	0,70
1.2.	Dana Perimbangan		394.469.837.907	452.448.700.958	517.825.943.150	590.840.833.728	4,2
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak		46.560.792.907	53.758.927.958	66.228.029.150	64.921.945.728	-2,1
1.2.2.	Dana alokasi umum		314.107.445.000	360.027.473.000	414.88.214.000	476.671.178.000	4,4
1.2.3.	Dana alokasi khusus		35.801.600.000	38.662.300.000	36.717.700.000	49.247.710.000	8,5
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		50.195.303.424	64.834.281.330	30.963.875.789,36	52.073.742.643,41	
1.3.1.	Hibah		10.090.822.000	6.389.449.000	29.311.980.740	66.202.234.162	
1.3.2.	Dana darurat						
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)		5.927.520.292	7.695.116.430	10.667.086.789,36	7.695.116.430	30,53
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus (***)		-	-	72.145.000	-	46,30
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		-	-	-	-	-
2	Belanja		224.647.177.051,40	305.869.091.164,38	285.803.120.478,49	336.493.380.745,28	17,1
2.1	Belanja Tidak Langsung		223.060.673.986,62	239.035.375.584,88	287.411.585.986,3	337.676.647.605,23	7,1
2.1.1	Belanja Pegawai		185.936.834.176	213.896.748.161	245.719.679.974	267.277.207.963,99	24,9

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	M

2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja Subsidi	335.792,000	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	10,090,822,000	6,389,449,000	29,311,980,740	66,202,234,162	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9,557,225,810,62	8,249,678,423,88	371,148,014,06	783,042,820	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	17,110,000,000	10,367,000,000	10,687,027,258,24	3,300,512,659,24	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	30,000,000	132,500,000	1,321,750,000	113,650,000	
2.2	Belanja Langsung	224,647,177,051,40	305,869,091,164,38	285,803,120,478,49	336,493,380,745,28	
2.2.1	Belanja Pegawai	6,462,517,105	7,878,662,550	9,243,152,184	26,262,122,971	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,235,333,036,90	94,392,891,020	101,253,058,365	100,919,211,180	
2.2.3	Belanja Modal	144,949,326,909,50	203,597,573,594,38	175,306,909,929,49	209,312,046,594,28	
3	Pembiayaan					
3.1	Penerimaan Pembiayaan		64,079,327,251,99	49,461,505,788,25	34,676,167,682,4	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,625,000,000	3,388,279,635	9,993,037,490	6,071,968,636	

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 - 2013

Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
Pendapatan Daerah :	453.727.532.701	529.087.272.467	566.863.818.443	702.907.449.120
a. Pendapatan Asli Daerah	17.784.938.284	17.647,532.000	22.826.600.000	37.265.500.000
b. Dana Perimbangan	385.131.765.209	445.890.010.000	516.324.863.376	603.960.744.000
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	50.810.829.208	65.549.730.467	27.712.355.067	61.681.205.120

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Daerah dari Tahun 2010-2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 pendapatan daerah mencapai Rp.453.727.532.701,- dan pada tahun 2013 mencapai Rp.702.907.449.120,- Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuatif selama tahun 2010 - 2013. Hal ini terlihat dari Tabel 3.4 dibawah dimana pertumbuhan pendapatan mencapai kenaikan 1,03 persen pada tahun 2010 ke tahun 2011 kemudian pada tahun 2011 ke tahun 2012 mencapai kenaikan 0,75 persen dan pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,73 persen. Pada sub pendapatan daerah yang mengalami penurunan yaitu pada tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 0,77 persen dan pada tahun 2012, mengalami penurunan pada Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar 57,72 persen dibandingkan tahun 2011. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat tabel dibawah ini.

KABAG. HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>W</i>

Tabel 3.2
Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013 (dalam persen)

Uraian		2010-2011	2011-2012	2012-2013
a.	Pendapatan Asli Daerah	-0,77	29,35	63,25
b.	Dana Perimbangan	15,78	15,80	16,97
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29,01	-57,72	122,58
Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah		1,03	0,75	0,73

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

Penyumbang terbesar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah dan terakhir bersumber dari pendapatan asli daerah. Struktur masing-masing sumber pendapat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010-2013

Uraian	Struktur (%)			
	2010	2011	2012	2013
Pendapatan Asli Daerah	3,92	3,36	4,03	5,30
Dana Perimbangan	84,88	84,26	91,08	85,92
Lain-lain pendapatan yang sah	11,20	12,39	4,89	8,76
Total Persentase Pendapatan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2010–2013 secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari nilai realisasi di setiap tahunnya yang melebihi dari 100 persen, kecuali tahun 2013 hanya mencapai 94,972 persen. Kenaikan realisasi pendapatan daerah dipengaruhi kenaikan pada realisasi pada dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, yang mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga tahun 2012, yang mencapai realisasi 100 persen lebih, sedangkan pada tahun 2013 turun hanya mencapai 97,83 persen. Penurunan pada tahun 2013 juga dipengaruhi oleh tidak tercapainya secara maksimal realisasi Pendapatan Asli Daerah, yang hanya mencapai realisasi sebesar 66,16 persen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel dibawah ini.

KABAG HUKUM	KASUBDAG
b.	u.

Tabel 3.4
Realisasi Persentase Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 – 2013 (dalam persen)

Uraian	2010	2011	2012	2013	Rata2 Pert
Persentase Realisasi Pendapatan :	101,026	100,754	100,726	94,972	4,6
a. Pendapatan Asli Daerah	77,13	89,49	97,21	66,16	2,8
b. Dana Perimbangan	102,42	101,47	102,29	97,83	4,2
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	98,79	98,91	111,73	84,42	10,9

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

Sehingga secara umum, untuk target dan realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2010 – 2013 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 – 2013

Uraian	Tahun 2010			Tahun 2011		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah	17.784.938.284	13.718.150.722,14	77,13	17.647.532.000	15.793.358.675,52	89,49
Dana Perimbangan	385.131.765.209	394.469.837.907	102,42	445.890.010.000	452.448.700.958	101,47
Lain-lain pendapatan yang sah	50.810.829.208	50.195.303.424	98,79	65.549.730.467	64.834.281.330	98,91
Pendapatan Daerah	453.727.532.701	458.383.292.053,14	101,026	529.087.272.467	533.076.340.963,52	100,754

Uraian	Tahun 2012			Tahun 2013		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah	22.826.600.000	22.189.739.348,92	97,21	37.265.500.000	24.653.836.617,10	66,16
Dana Perimbangan	516.324.863.376	517.825.943.150	102,29	603.960.744.000	590.840.833.728	97,83
Lain-lain pendapatan yang sah	27.712.355.067	30.963.875.789,36	111,73	61.681.205.120,43	52.073.742.643,41	84,42
Pendapatan Daerah	566.863.818.443	570.979.558.288,28	100,726	702.907.449.120,43	667.568.412.988,51	94,972

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

3.1.1.2 Pendapatan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Tahun 2010 - 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Pendapatan Asli Daerah	13.718.150.722,14	15.793.358.675,52	22.189.739.348,92	24.653.836.617,10
a. Pajak Daerah	2.132.629.462	2.231.699.861	2.794.211.417,10	6.894.921.297,6
b. Retribusi Daerah	3.515.390.560,00	3.895.404.495	4.544.759.194,00	7.269.485.704,10
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.520.285.948,71	2.522.896.531,30	3.060.277.107,31	3.716.436.535,38
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.549.844.751,43	7.143.357.788,22	11.790.491.630,51	6.772.993.080,02

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

Berdasarkan Tabel diatas, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010 - 2013 cenderung meningkat dengan signifikan. Pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp.13.718.150.722,14,- dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 24.653.836.617,10, penyumbang terbesar pendapatan asli daerah berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, kecuali tahun 2013 penyumbang terbesarnya dari retribusi daerah. Hal tersebut mencerminkan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan dalam optimalisasi peningkatan pendapatan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan. Struktur sumber pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas

Uraian	Struktur (%)			
	2010	2011	2012	2013
Pajak Daerah	15,45	17,09	15,40	22,65
Retribusi Daerah	37,28	23,42	15,08	17,34
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8,63	11,73	11,26	11,14
Lain lain PAD	38,64	47,76	58,27	48,88
Pendapatan Asli Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber :DPKA Kab. Gumas, 2014

Berdasarkan tabel dibawah, pendapatan asli daerah tahun 2010 - 2013 tidak terealisasi sesuai target 100 persen secara keseluruhan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah tahun 2010-2013 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan masih belum tercapainya target realisasi untuk pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Realisasi PAD dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2011 - 2012 melebihi target yaitu 121,88 persen dan 119,08 persen, namun terjadi penurunan dibawah target pada tahun 2013 hanya 89,55 persen. Hal ini disebabkan pengelolaan kekayaan daerah masih belum terlaksana optimal, mengingat masih tidak tercapainya penerimaan bagian laba atas penyertaan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
t.	M.